



KR-Djoko Santoso HP

Suasana talkshow Presidium 1912.

## '1912 Talk' Kawula Muda Muhammadiyah

**WONOGIRI (KR)** - Presidium 1912 Pemuda Muhammadiyah Wonogiri, menggelar acara '1912 Talk' di Graha Saraswati, Kamis (14/11). Deklarasi sebagai penguat dukungan kawula muda Muhammadiyah terhadap pasangan calon nomor urut dua SETIA (Setyo-Imron) untuk memenangkan Pilkada Wonogiri 2024. Acara diskusi menghadirkan tokoh-tokoh penting sebagai pemantik, antara lain Horo Wahyudi dari LP UMKM PP Muhammadiyah, Tri Widodo selaku Dewan Pembina 1912 sekaligus Wakil Ketua Muhammadiyah Wonogiri, serta Calon Bupati Wonogiri Setyo Sukarno.

Presidium 1912, yang secara resmi mendeklarasikan dukungannya pada pasangan SETIA pada Oktober 2024, menjadi mesin penggerak bagi ribuan kader muda Muhammadiyah yang tersebar di seluruh kecamatan di Wonogiri. Mereka berkomitmen untuk mendukung visi pembangunan daerah yang berkemajuan dan berkelanjutan. Menurut Heriwanto, Ketua Presidium 1912, acara ini tidak hanya sebagai sarana konsolidasi internal tim pemenang. Tetapi juga bertujuan memberi ruang bagi pemuda untuk menyumbangkan gagasan bagi kemajuan Wonogiri.

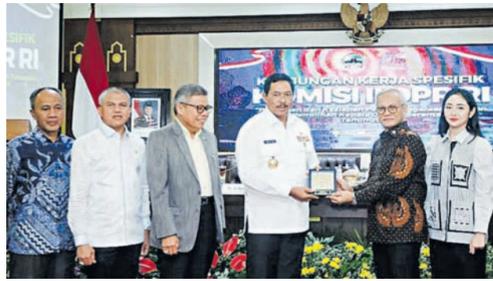
"Kami berharap melalui acara ini, anak-anak muda bisa memberikan ide-ide segar untuk Pak Setyo, sehingga Wonogiri semakin maju dan berkelanjutan," ungkap Heriwanto. Acara ini diharapkan menjadi momentum penting bagi generasi muda yang berafiliasi kepada Muhammadiyah untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan Wonogiri, sejalan dengan visi kemajuan dan keberlanjutan yang diusung pasangan duet PDI-P dan Gerindra Wonogiri. (Dsh)-f

## Pisah Sambut Dandim 0708/Purworejo

**PURWOREJO (KR)** - Komandan Kodim (Dandim) 0708/Purworejo resmi dijabat Letkol Inf Imam Purwoko, menggantikan pejabat lama, Letkol Inf Yohanes Heru Wibowo yang dialihugaskan sebagai Kasdim 0733/BS Semarang. Pisah sambut Dandim 0708/Purworejo dilaksanakan di Ganeca Convention Hall, Selasa (12/11). Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Purworejo, Endi Faiz Effendi SPI MA dalam sambutannya mengatakan, keberadaan Kodim 0708/Purworejo sangat dirasakan peran dan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo. Kondusifitas wilayah sejauh ini terjaga dengan baik sehingga proses pembangunan di berbagai bidang bisa berjalan lancar. Semua itu tidak terlepas dari kerja keras Kodim 0708/Purworejo dibawah kepemimpinan Letkol Inf Yohanes Heru Wibowo beserta seluruh jajarannya.

"Setiap pimpinan tentu memiliki sifat dan karakter yang membawa kesan berbeda satu sama lain, dan selayaknya bisa diterima dengan baik oleh anggota maupun masyarakat," ujarnya. Ditambahkan, Dandim selaku pimpinan militer tertinggi di tingkat kabupaten/kota berperan dalam pembinaan kewilayahan. Sehingga memiliki peran signifikan dalam kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, melalui pembinaan teritorial yang dilaksanakan. "Kami berharap dapat tercipta kemandirian dan ketahanan wilayah yang tangguh dalam upaya menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan," tandasnya. (\*-5)-f

## Petugas Adhoc Pilkada Terdaftar di BPJS



KR-Budiono

Nana Sudjana (tiga dari kanan) menerima rombongan Komisi II DPR RI.

**SEMARANG (KR)** - Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menegaskan, Badan adhoc di bawah jajaran KPU dan Bawaslu kabupaten/kota di Jateng yang bertugas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, dipastikan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kerja. Nana Sudjana menegaskan hal ini saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di ruang kerja Gubernur Rabu (13/11). Menurut Nana, dalam perjalanan pemilu banyak penyelenggara pemilu adhoc yang meninggal dunia. Situasi tersebut tentu menjadi sebuah keprihatinan.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2024, Nana Sudjana memastikan penganggaran perlindungan sosial kepada penyelenggara pemilu adhoc. Pemprov Jateng memastikan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas adhoc, sudah masuk dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KPU dan Bawaslu. Pemprov Jateng sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu selaku pemberi kerja, untuk memastikan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas adhoc. Pemberian jaminan sosial tersebut juga sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.5.74295/SJ tanggal 3 September 2024 tentang perlindungan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), bagi badan Adhoc KPU dan Bawaslu.

Anggota komisi II DPR RI Muhammad Toha mendukung pemberian perlindungan jaminan sosial bagi para penyelenggara badan adhoc pemilu, yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Tengah. Untuk itu DPR RI minta kepada KPU dan Bawaslu Jateng untuk memastikan seluruh badan penyelenggara adhoc pemilu sudah tercover perlindungan jaminan sosial tersebut. (Bdi)-f

## Pertamina Jaga Operasional Lembaga Penyalur Elpiji

**SEMARANG (KR)**- PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Ditjen PKTN Kemendag) tegaskan untuk menjaga operasional di lembaga penyalur ur dengan mengunjungi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Gas Sono Putra di Kota Semarang pada hari Selasa (12/11) lalu. Kegiatan ini juga didampingi oleh Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional II, Unit Pengelola Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Semarang, dan Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Pejabat Sementara Sales Branch Manager Semarang V Gas, Ardian Dominggo Wiryosukarno menyampaikan, bahwa Pertamina selalu melaksanakan kewajiban dengan melakukan penegasan opera-

sional baik dari segi alat maupun takaran pada lembaga penyalur hal ini merupakan bentuk komitmen Pertamina dalam menerapkan aturan yang berlaku. "Pertamina secara rutin memantau dan memonitor langsung setiap operasional penyaluran energi pada lembaga penyalur termasuk di SPBE. Berdasarkan kunjungan juga ini kami Pertamina ditegaskan untuk mengawasi kinerja lembaga penyalur terkait takaran dan alat ukur yang digunakan di SPBE. UPT Metrologi Legal Kota Semarang juga menegaskan standar-standar yang berlaku," ujarnya.

Ditjen PKTN Kemendag, Rusmin Amin, menyampaikan dalam kunjungannya bahwa Pertamina sebagai perusahaan telah menunjukkan bentuk bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen. "Kami melihat ke-

sesuaian Pertamina dalam menjaga operasional di lembaga penyalur, sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik," kata Rusmin.

Terpisah, Area Manager

Communication, Relations & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho, menyampaikan bahwa Pertamina akan selalu menin-

dag tegas terkait operasional yang berjalan di lembaga penyalur agar menjamin hak-hak konsumen akan terpenuhi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Ditjen PKTN. (Cha)-f



KR-Chandra AN

Peninjauan SPBE di Semarang untuk memastikan dan menjamin keamanan penyaluran Elpiji.

## KPU Salatiga Siapkan 5 Panelis Baru

**SALATIGA (KR)**- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Salatiga menyiapkan lima panelis wajah baru saat pelaksanaan debat publik kedua Pilkada Salatiga 2024, Selasa (19/11) malam di Auditorium UIN Salatiga. Komisioner KPU Salatiga, Wahyu Budi Utomo mengungkapkan kelima panelis akan merumuskan pertanyaan dalam debat tersebut.

KPU menggandeng lima panelis, yaitu Mila Karmila, akademisi Unisula Semarang yang merupakan ahli perencanaan tata kota, kemudian Andreas Pandiangan, penggiat kepemiluan

yang juga Mantan Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, Mukti Ali (Guru Besar Komunikasi Budaya UIN Salatiga), dan Gatot Sasongko (akademisi pakar ekonomi UKSW Salatiga dan

mantan Sekda Salatiga Fakhrurozi.

"Ada pembatasan jumlah yang hadir yang diperbolehkan masuk dalam area debat. Skema urutan juga masih sama, dimulai dengan pema-

paran visi misi, jawaban dari calon, tanya jawab, dan penutup. Panelis semua wajah baru," kata Wahyu Budi Utomo, Kamis (14/11). KPU memperbolehkan partai pengusul dan relawan masing-masing paslon menghadiri debat publik maksimal 75 orang. Pembatasan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya benturan antar pendukung saat acara debat. Ketua KPU Salatiga

Yesaya Tiluata mengatakan, debat publik kedua antar paslon ini untuk memberikan gambaran bagi para pemilih terkait visi misi dan program kerja para paslon walikota dan wakil walikota peserta kontestasi Pilwalkot Salatiga 2024. Untuk tema adalah perbaikan infrastruktur yang handal, perekonomian berdaya saing dan berkelanjutan menuju masyarakat harmoni. (Sus)-f

## Pemprov Jateng Siap Tertibkan Galian C

**SEMARANG (KR)** - Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menegaskan, ditegapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba) menjadi peraturan daerah (Perda) oleh DPRD Jateng, Pemprov Jateng siap menertibkan pengelolaan galian C di wilayahnya. Nana Sudjana menegaskan hal itu saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Rabu (13/11) di Semarang.

Nana Sudjana mengakui di Jateng banyak galian C yang tidak berizin. Untuk

itu Pemprov Jateng akan meluruskan kembali aturan-aturan yang selama ini tidak berjalan. Jumlah pengusaha tambang galian C di Jateng yang legal atau yang memiliki izin hanya sekitar 30 persen. Ini akan akan kita diskusikan dengan DPRD dan instansi terait. Ke depan akan kita tertibkan sesuai aturan yang berlaku terkait dengan izin pertambangan," tegas Nana.

Dengan disetujuinya Raperda dan disahkan menjadi Perda, selain dapat menjadi payung hukum, juga mampu menjawab perkembangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan dan pe-



KR-Budiono

Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menerima naskah persetujuan Perda soal Minerba.

ngelolaan pertambangan minerba di Jateng. "Kami berharap dengan adanya regulasi tersebut dapat tercipta pembangunan yang

berkelanjutan, karena pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang mendukung pembangunan, terutama pada pe-

ngembangan infrastruktur. Pokok-pokok pengaturan pada Raperda ini merupakan upaya untuk mendukung perlindungan terhadap lingkungan," ujar Nana.

Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto menegaskan, kewenangan perizinan pertambangan minerba, khususnya batuan dan mineral bukan logam, saat ini sudah dilimpahkan ke pemerintah provinsi, dari yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan kebijakan tersebut diharapkan akan memberikan manfaat terhadap pendapatan asli daerah (PAD). (Bdi)-f

## Pemerintah Didorong Beri Dana Alokasi Khusus Ketahanan Pangan

**SEMARANG (KR)** - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Jateng, Dr Abdul Kholik SH MSi menyatakan, tren lima tahun terakhir kondisi ketahanan pangan di Jateng terus mengalami penurunan yang cukup serius, baik dari sisi produksi maupun luas lahan pertanian.

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena lahan pertanian berkurang sekitar 62 ribu hektar. Itu artinya hampir sama dengan jumlah produksi gabah selama lima tahun berkurang sekitar 1 juta ton. Ini sebenarnya menunjukkan lumbung pangan di Jateng sangat rapuh," tegas Abdul Kholik pada FGD Evaluasi Ketahanan Pangan Provinsi Jateng dan Proyeksi Tahun 2025 di Kantor DPD RI, Jalan Imam Bonjol Semarang, Rabu (13/11).

FGD yang diinisiasi senator Jateng Abdul Kholik ini menghadirkan narasumber Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng, Himawan Wahyu Pamungkas, dan Wakil Kepala Wilayah Bulog Jateng Fadillah Rachmawati, dan para mitra terkait maupun stakeholder DPD RI.

Abdul Kholik meminta pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan menjadikan Jateng lumbung pangan, karena faktanya ketahanan pangan terus menurun. Tetapi, lanjut dia, kalau pemerintah konsisten Jateng harus didukung secara penuh oleh pemerin-

tah pusat agar menjadi lumbung pangan.

"Kalau tidak didukung secara penuh, baik itu kesejahteraan petaninya dan sebagainya harus diperhatikan pemerintah, tetapi kalau cuman dijadikan slogan lebih baik Jateng jangan dijadikan lumbung pangan," katanya.

Abdul Kholik juga meminta kepada pemerintah pusat lebih serius lagi, kalau memang Jateng dijadikan lumbung pangan, maka pemerintah harus bertanggung jawab. Karena selama ini faktanya pemerintah hanya memberi lebel kepada Jateng sebagai lumbung pangan. "Pemerintah Pusat harus serius, dan wajib memberikan alokasi khusus pen-

danaan untuk ketahanan lumbung pangan di Jateng," katanya.

Sementara Himawan Wahyu Pamungkas, Sekretaris Distabun Jawa Tengah menyampaikan bahwa konsumsi beras untuk Jawa Tengah tahun 2024 sekitar 1,1 juta ton. Perlu peningkatan produksi beras untuk menuju ketahanan pangan.

Dia menyebutkan, penyebab kekurangan target dari surplus beras di Jawa Tengah karena adanya beberapa faktor. Pertama karena alih fungsi lahan. Tahun 2024 terjadi pengurangan lahan seluas 62,192 Ha di Jawa Tengah. Dari luas baku sawah 1.049.661 Ha (data 2019) menjadi 987.648 Ha (data tahun 2024).

Kedua perubahan iklim, perubahan suhu dan pola cuaca berpengaruh kualitas air dan kuantitasnya menurun. Dan ketiga adanya gejala harga pangan. Upaya pencegahan dan mengatasi kekurangan target surplus beras yaitu dengan intervensi pemberian bantuan pupuk organik dan peningkatan provitas, rehabilitasi lahan dan peningkatan luas baku sawah.

Himawan juga menyampaikan terkait alih fungsi lahan persawahan di wilayah Jawa Tengah yang semakin masif. Dalam lima tahun terakhir ini lahan sawah seluas 62 ribu hektare di Jawa Tengah hilang dan berubah menjadi perumahan, kawasan industri hingga objek wisata.

Menurutnya, data tersebut dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN yang menyebutkan, pada tahun 2019 sampai 2024, luas lahan persawahan di Jateng berkurang hingga 62.193 hektare.

Himawan menyebut, terjadi pengurangan luas baku sawah dari 1.049.661 hektare tahun 2019 menjadi 987.648 hektare tahun 2024 (terjadi pengurangan seluas 62.193 hektare).

Dia menjelaskan jika alih fungsi lahan tertinggi ada di Kabupaten Grobogan. Diketahui, dalam lima tahun terakhir, lahan sawah seluas 8.387 hektare di Grobogan telah beralih fungsi. (Cha)-f



KR-Chandra AN

Dr Abdul Kholik, anggota DPD RI mengungkapkan data ketahanan pangan Jateng dalam grup diskusi di Semarang.